

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | |
|--------------|---------|
| Media Online | |
| Media Cetak | Indopos |

Utamakan Bansos untuk Kebutuhan Perut

JAKARTA-Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengingatkan Pemprov DKI agar mendistribusikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Terlebih lagi, DPRD mengalihkan anggaran kegiatan sebesar Rp256,5 miliar untuk penanganan Covid-19.

Prasetyo menuturkan, bantuan sosial yang diberikan kepada warga jangan hanya berbentuk penunjang kesehatan seperti cairan anti septik, masker, sabun. Menurut politikus PDIP itu, kebutuhan perut hal utama.

"Kita lengkapi sanitazer, masker, ventilator, tapi kita lupa perut. Nah kalau lapar, dikhawatirkan mereka mencari dengan hal negatif," kata Prasetyo, Rabu (29/4/2020). Sementara itu, Dinas Sosial DKI belum merespons mengenai rincian distribusi bansos untuk PSBB tahap dua. DPRD mengalihkan sejumlah anggaran kegiatan tahun 2020 untuk penanganan Covid-19. Keputusan ini diambil dalam rapat pimpinan gabungan (Rapingab).

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, efisiensi anggaran dilakukan pada semua kegiatan kunjungan kerja alat kelengkapan dewan (AKD), sosialisasi perda, dan reses. Nilai realokasi yang disepakati sebesar Rp 256,5 miliar.

Harus Transparan

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria menegaskan Pemprov DKI dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) harus tepat sasaran. Kejadian salah sasaran harus diperbaiki dalam proses penyaluran bansos tahap kedua.

"Kita pernah rapat sama mereka (Dinsos) untuk minta data penerima bansos tahap pertama. Untuk tahap berikutnya lebih transparansi lagi," kata Iman, di Jakarta, Rabu (29/4/2020). Iman menyinggung soal nama anggota DPRD dari Fraksi PDIP Jhonny Simanjutak yang masuk dalam penerima bansos DKI. Akurasi data sangat penting agar warga yang benar-benar membutuhkan menerima paket sembako selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Jangan nanti ada anggota dewan lagi yang menerima. Kami kan juga bisa bantu awasi di dapil masing-masing. Benar enggak penerimaan bantuan itu. Asal dari mereka terbuka



Kita lengkapi sanitazer, masker, ventilator, tapi kita lupa perut. Nah kalau lapar, dikhawatirkan mereka mencari dengan hal negatif."

Prasetyo Edi Marsudi
Ketua DPRD DKI Jakarta

juga," tutur Iman.

Dirinya mengatakan warga yang rentan miskin bertambah dari hari ke hari. Hal ini imbas banyaknya perusahaan yang ditutup selama PSBB. Pemprov DKI dinilai perlu melibatkan RW untuk mendata penerima bansos. Jangan sampai daftar penerima bansos memakai data lama.

"Itu jadi concern kita. Saat ini angka warga yang telantar juga terlihat (naik). Yang kena PHK, hidupnya dari indekos ke indekos. Pulang kampung sudah enggak boleh, kan harus diperhatikan juga," ujarnya.

Pemprov DKI menunda sementara penyaluran bansos tahap dua. Kepala Divisi Perkulakan Retail Distribusi PD Pasar Jaya, Edison Sembiring, mengungkapkan Pemprov DKI sedang membahas terkait akurasi data penerima.

"(Bansos) ini sedang dibahas di tingkat pemprov ya. Supaya di dalam (penyaluran) bansos kedua ini lebih akurat semuanya," ujar Edison di Jakarta, Selasa (28/4/2020).

Beda Isi

Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi D dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mempertanyakan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perihal harga paket bantuan sosial (Bansos), kepada warga yang terdampak langsung wabah Covid-19.

Pasalnya, pria yang kerap disapa Kent ini mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah menganggarkan paket sembako yang diberikan kepada warga setiap kepala keluarga (KK) seharga Rp149.500.

Namun, fakta di lapangan tak sesuai dengan yang dianggarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta. "Saya mendapatkan laporan bahwa paket bansos Covid-19

berbeda-beda isinya. Paket tersebut seharusnya seharga Rp149.500,- tapi paket tersebut tidak sampai seharga yang sudah dianggarkan," kata Kent, di Jakarta Rabu (29/4/2020).

Dari hasil temuan di lapangan, Kent menemukan perbedaan kemasan paket sembako. Ada yang dari kardus dan juga plastik yang ditempel stiker pemprov. Hal tersebut pun membuat warga bertanya-tanya dengan bedanya paket bansos tersebut dan juga hingga saat ini masih banyak warga yang terdampak langsung wabah Covid-19 yang tidak mendapatkan paket tersebut secara merata.

Padahal mereka benar-benar menjadi korban dampak pandemi Covid-19 ini dan sangat mengharapkan bantuan paket bansos tersebut. Seharusnya, kata Kent, Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan harus bisa merangkul seluruh warga yang menjadi korban terdampak langsung Pandemi Covid-19.

"Harusnya dalam kondisi seperti ini Pemprov DKI harus bisa sigap untuk menenangkan warga dengan memberikan penjelasan, dan informasi sejelas jelasnya dan transparan. Saat ini masih banyak juga warga yang tidak dapat paket bansos ini dan pendistribusiannya yang tumpang tindih, lantas bagaimana solusi untuk warga yang pulang kampung? Semua hanya wacana saja," tegas Kent.

Kent pun menegaskan, Pemprov DKI Jakarta agar tidak main-main dengan pendistribusian paket sembako untuk warga Jakarta ini. "Saya minta Pemprov DKI Jakarta jangan macam-macam dengan nasib rakyat yang lagi kesusahan karena terdampak langsung wabah Covid - 19 ini. Saya minta agar PD. Pasar Jaya, Dinas Sosial dan Gu-



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 |
|---|---|---|---|

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | |
|--------------|---------|
| Media Online | |
| Media Cetak | Indopos |

Utamakan Bansos untuk Kebutuhan Perut

bernuar Anies Baswedan terbuka dalam permasalahan ini," tuturnya.

Ia pun mengapresiasi penundaan pemberian Bansos tahap kedua, pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal tersebut dan kini sedang dilakukan perbaikan penerima data bansos, agar tak terjadi kesalahan lagi seperti periode pertama yang dilaksanakan pada 9 April hingga 24 April.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Pemprov DKI melalui laman resmi corona.jakarta.go.id, bansos yang sudah disalurkan ada sebanyak 1.178.173 kepala keluarga (KK). Target pemberian bansos yang diberikan oleh Pemprov DKI sebanyak 1,2 juta KK.

"Memang seharusnya diubah sistem pemberian dan penerima bansos, agar tidak tumpang tindih. Dan harus diperbaharui kembali data yang baru, karena banyak yang tidak mendapatkan bansos hingga saat ini," katanya.

Kent juga meminta kepada Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini PD. Pasar Jaya, agar tidak terlalu lama melakukan penundaan pemberian Bansos Covid-19 tahap kedua. Banyak warga yang tak mampu bergantung hidup kepada paket bansos tersebut.

"Jangan terlalu lama untuk menunda paket bansos tersebut, karena warga sangat membutuhkan. Jangan sampai warga terlanjur mati kelaparan karena tidak mendapatkan paket bansos itu, karena terlalu berbelit-belit birokrasinya," tuturnya.

Selain itu, Gubernur Anies Baswedan harus kembali memikirkan solusi karena banyaknya warga yang diam-diam sudah pulang ke kampung halaman. Itu karena di Jakarta tidak ada yang menjamin kehidupannya.

"Mereka memilih untuk pulang kampung diam-diam, daripada di Jakarta tidak ada apa-apa dan tidak mendapatkan apa-apa. Karena mereka pikir disini tidak ada kepastian bantuan dan jaminan dari Pemprov DKI. Oleh karena itu, saya meminta kepada Pak Anies harus benar-benar memikirkan kembali nasib warga Jakarta yang tidak pulang kampung," katanya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada 1,2 juta Kepala Keluarga (KK) berstatus miskin dan rentan miskin di ibu kota. Tujuan distribusi ban-

sos untuk membantu warga terdampak Covid-19. Diketahui, nilai total harga paket bantuan sembako yang diterima warga ibu kota, ternyata tak sesuai dengan yang dianggarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta menganggarkan paket sembako yang diberikan kepada warga membutuhkan tiap kepala keluarga (KK) seharga Rp149.500, namun fakta yang ditemukan di lapangan berbeda. Misalnya di RW 05 Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, masing-masing wilayah RT, warganya menerima paket sembako yang berbeda-beda.

Warga RT 01 hanya sebagian KK yang mendapat sembako. Sembako yang dikemas dalam satu kardus berisi beras 5 kilogram, jika dinilai harga rata-rata di pasaran jadi Rp50 ribu, sarden 2 kaleng merek Gaga ukuran 155 gram seharga Rp15 ribu dan satu botol minyak goreng merek Tropical ukuran 1 liter, seharga Rp15 ribu.

Kemudian 2 buah biskuit Roma Sari Gandum seharga Rp 12 ribu dan masker kain 2 pieces seharga Rp 10 ribu. Sehingga total nilai paket sembako tersebut seharga Rp 102 ribu.

Perlu Donatur

Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan dan Perbukitan Suharti, mengatakan Pemda DKI juga banyak sekali membutuhkan bantuan dari para donatur untuk disalurkan kepada masyarakat.

Menurutnya, bantuan yang dibutuhkan tidak hanya yang terkait dengan kesehatan. Tetapi perlu bantuan dari sektor lainnya. "Karena dampak dari Covid-10 ini terjadi pada segala sektor, seperti ekonomi dan sosial. Meskipun Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat menyediakan bantuan, tetapi tetap memerlukan bantuan dari donatur," cutusnya usai menerima bantuan masker dari BPJAMSOSTEK Wilayah DKI Jakarta, Rabu (29/4/2020).

Suharti mengatakan, untuk itulah Pemprov DKI kini membuat platform kolaborasi sosial bersekala besar (KSBB) untuk menampung bantuan-bantuan dari para donatur. Baik itu dari donatur individu, dari lembaga, termasuk dari perusahaan-perusahaan. Menurutnya, saat ini bantuan

berupa pangan sangat bermanfaat untuk masyarakat miskin.

"Kita buat platformnya (website) corona.jakarta.go.id, bentuk bantuannya bisa berupa makanan jadi, bisa sembako, bisa juga berbentuk THR (uang tunai). Untuk yang membantu bisa mengelola sendiri bantuannya, juga bisa dikelola oleh agregator, ada PMI, Basnas, Bazis DKI, ACT, dan Rumah Zakat," paparnya.

Di platform sudah disiapkan formulir untuk donatur. Donatur juga bisa memilih RW mana yang mau dibantu. Bentuk serta jumlah bantuan semua terdata dalam formulir dan ditampilkan dalam platform. "Kita ingin setransparan mungkin. Bagaimanapun juga akuntabilitas harus dijaga," ungkapnya.

Menurut Suharti, sejauh ini bantuan dari donatur cukup banyak terutama berupa sembako. "Baznas juga sudah membantu panti-panti sosial. Perusahaan-perusahaan ada yang menyalurkan bantuan senilai Rp2,5 miliar sampai Rp5 miliar," ujarnya. Suharti mengatakan, warga yang merasa layak mendapatkan bantuan tapi belum menerimanya bisa segera lapor ke RT/RW. Data dari RW nanti akan langsung diverifikasi.

Suharti mengajak seluruh warga DKI Jakarta agar kompak untuk memutus penyebaran Covid-19. Menurutnya, protokol PSBB (pembatasan sosial bersekala besar) tidak berubah. Masyarakat harus tetap menjaga jarak, menjaga kebersihan diri, mencuci tangan, dan tidak mudik. "Pak Gubernur dan Pak Presiden berkali-kali menyampaikan imbauan agar warga tidak mudik. Kita tidak ingin Jakarta sebagai episentrum Covid-10 menyebarkan lebih banyak menularkan wabah ke wilayah lain di Indonesia. Jangan sampai ada gelombang penularan baru ketika ada arus mudik," cetusnya.

Subari mengatakan Pemprov DKI ingin warga Jakarta tetap tinggal di ibu kota dan memastikan tidak sampai kelaparan selama masa Covid-10. "Tentunya upaya ini harus dibantu oleh masyarakat yang mampu. Kalau Pemprov sendiri yang menanggung tentu tidak mampu memenuhi semua kebutuhan warga. Jadi kolaborasi itu yang penting sekali," tegasnya. (dni)